



MOMENTUM ANTAGONISME LACLAU DALAM KASUS *BREXIT*

Feny Cahyani Sinaga ¹, Oktavina Yohana Pottu ²

Program Studi Hubungan Internasional

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

fenysinagaa@gmail.com

Abstract (English)

Often antagonism is interpreted negatively because it is related to conflict or division. However, for Laclau antagonism functions as a basis for the formation of political identity. This research seeks to reveal the momentum of Laclau's antagonism in the Brexit case. "Vote Leave" and "Britain Stronger in Europe" are two camps that played an important role in the Brexit referendum. Both of them fight each other in discourse or discourse. The winner is determined based on the antagonism. This research is interesting to read because it uses the thoughts of Ernesto Laclau. By using the concept of populism, researchers try to understand more deeply the reasons why Britain left the European Union.

Article History

Submitted: 10 Oktober 2024

Accepted: 17 Oktober 2024

Published: 18 Oktober 2024

Key Words

Brexit, antagonism, Laclau, European Union

Abstrak (Indonesia)

Seringkali antagonisme diartikan secara negatif karena berkaitan dengan konflik atau perpecahan. Namun, bagi Laclau antagonisme berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan identitas politik. Penelitian ini berupaya mengungkap momentum antagonisme Laclau dalam kasus Brexit. "Vote Leave" dan "Britain Stronger in Eropa" adalah dua kubu yang memainkan peran penting dalam referendum Brexit. Keduanya saling bertarung dalam wacana atau diskursus. Pemenangnya ditentukan berdasarkan antagonismenya. Penelitian ini menjadi menarik untuk dibaca karena menggunakan pemikiran Ernesto Laclau. Dengan menggunakan konsep populisme peneliti berusaha memahami lebih dalam alasan Inggris meninggalkan Uni Eropa.

Sejarah Artikel

Submitted: 10 Oktober 2024

Accepted: 17 Oktober 2024

Published: 18 Oktober 2024

Kata Kunci

Brexit, antagonisme, Laclau, Uni Eropa

PENDAHULUAN

Gagasan penting dalam penelitian ini adalah menelusuri momentum antagonisme Laclau dalam kasus *Brexit*. Peneliti menggunakan konsep populisme yang dicetuskan oleh Ernesto Laclau. Ia menekankan pentingnya "antagonisme" atau "lawan" dalam populisme. Saat konflik memuncak, populisme muncul sebagai kekuatan politik yang kuat. Tulisan ini akan berfokus pada perlawanan Inggris terhadap kebijakan Uni Eropa khususnya dalam kebijakan "*Open Door Immigration Policy*" yang mengancam stabilitas keamanan dan identitas nasional masyarakat Inggris. Oleh karena itu, penting untuk mengungkap gerakan populisme Inggris sebagai respon ketidakpuasan terhadap kebijakan imigran Uni Eropa. Dengan menggunakan konsep populisme, pemisahan antara "kami" (Inggris yang ingin keluar dari Uni Eropa) dan "mereka" (birokrasi Uni Eropa) terlihat sangat jelas.

Lonjakan imigrasi besar-besaran dari negara-negara Uni Eropa ke Inggris terjadi setelah perluasan besar Uni Eropa pada 1 Mei 2004. Pada saat itu, sepuluh negara baru, termasuk delapan negara Eropa Timur (seperti Polandia, Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia), bergabung dengan Uni Eropa. Hal ini menjadi awal peristiwa penting dalam sejarah imigrasi Eropa ke Inggris.





Setelah lonjakan migrasi pada tahun 2004, Inggris memberlakukan pembatasan akses pekerja dari Rumania dan Bulgaria. Batasan tersebut berlaku dari tahun 2007-2013. Pembatasan tersebut mengharuskan warga Rumania dan Bulgaria memiliki izin kerja khusus untuk sektor-sektor tertentu, seperti pertanian dan pekerjaan musiman. Pada masa ini, arus imigrasi menurun, tetapi mulai meningkat di tahun 2014 setelah pembatasan dihapus.

Ketika pembatasan izin kerja dihapus, jumlah imigran di Inggris kembali meningkat. Warga Rumania dan Bulgaria bebas masuk ke Inggris untuk bekerja tanpa adanya izin kerja, terutama di sektor konstruksi, pertanian, dan perhotelan. Peningkatan jumlah pekerja Rumania dan Bulgaria ke Inggris mulai menjadi isu politik yang signifikan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan tentang imigrasi di Inggris menjelang referendum Brexit pada tahun 2016 (Sherin & Virginia, 2018).

Penelitian ini menjadi menarik, karena menggunakan ide kritis Ernesto Laclau tentang antagonisme. Menurut Laclau, antagonisme adalah pusat dari perjuangan politik. Konflik menjadi esensial, dan tidak ada lagi kompromi yang mungkin. Identitas politik terbentuk secara tajam, dan posisi-posisi politik menjadi lebih ekstrem (Laclau, 2005).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Menurut Caswell, penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data (Caswell, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana momentum antagonisme Laclau digunakan dalam kasus *Brexit*. Dengan pendekatan ini peneliti dapat mengeksplorasi gerakan-gerakan populis Inggris yang menentang kebijakan Uni Eropa. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menganalisis dokumen, seperti buku, jurnal, dan artikel.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan kembali kebijakan *Open Door Immigration Policy*

Kebijakan *Open Door Immigration* yang ditetapkan oleh Uni Eropa pada tahun 1973, mewajibkan Inggris membuka pintu perbatasan keamanannya kepada para imigran dan imigran dapat bebas masuk dan menetap di negaranya. Uni Eropa menjelaskan kebijakan tersebut dibuat atas dasar kemanusiaan dan untuk kepentingan bersama dalam organisasi Uni Eropa, namun kebijakan tersebut menyebabkan lonjakan imigrasi yang tidak terkendali, sehingga berdampak pada kesejahteraan dan keamanan warga Inggris (Stefanie, 2022).

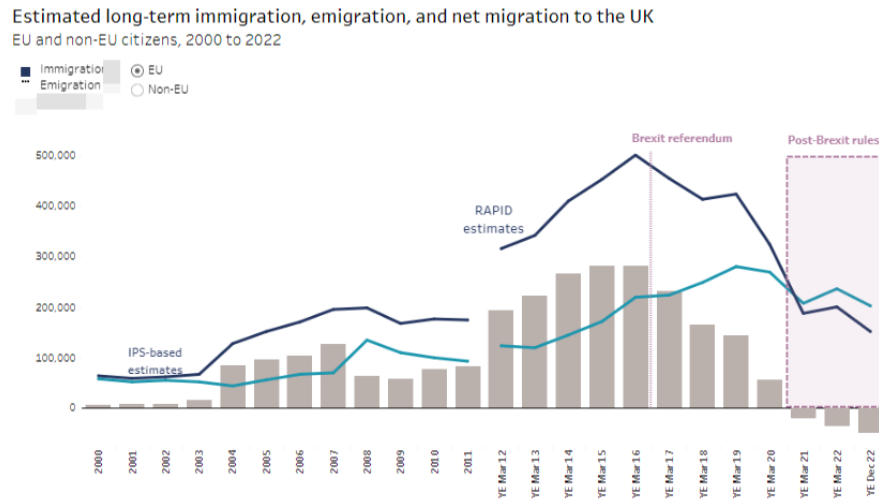
Di bawah pemerintahan David Cameron, masyarakat Inggris sering melakukan tuntutan untuk mengatasi masalah imigran dan menyuarakan perubahan terhadap kebijakan Inggris. Namun saat itu, Inggris masih merupakan keanggotaan Uni Eropa dan harus mengikuti kebijakan Uni Eropa terkait imigran. Dalam kebijakan tersebut, imigran mendapatkan hak serta kesempatan yang sama dengan masyarakat Inggris baik dalam bidang pekerjaan, fasilitas publik, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya kecemburuan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat Inggris. (Sherin & Virginia, 2018).

Setelah kebijakan tersebut, lonjakan imigran dari Uni Eropa tidak dapat dihindari. Berdasarkan data dari *The Immigration Observatory*, terlihat bahwa setelah tahun 2004, ketika Uni Eropa melakukan perluasan terhadap negara-negara Eropa Timur seperti Polandia, Hungaria, dan



Rumania, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah imigran yang datang ke Inggris. Lonjakan ini berlanjut hingga puncaknya pada tahun-tahun menjelang referendum Brexit pada 2016 (lihat gambar 1).

Gambar 1 Imigrasi Jangka Panjang Warga Negara UE ke Inggris, Tahun 2000-2022 (garis berwarna hitam adalah simbol untuk Immigration EU)



Sumber: The Immigration Observatory

Pada Desember 2022, migrasi bersih jangka panjang warga negara UE ke Inggris bernilai negatif (-51.000), menurut perkiraan Kantor Statistik Nasional (ONS) yang diterbitkan pada Mei 2023. Migrasi bersih dari UE berubah negatif pada tahun 2020, setelah dimulainya pandemi, dan terus menurun pada tahun 2021 dan 2022 (Gambar 1). Data tersebut menandakan perubahan positif yang signifikan semenjak referendum Inggris hingga pada pasca *Brexit*. Selama ini, ada dua puncak utama dalam migrasi dari UE. Yang pertama terjadi tidak lama setelah perluasan UE tahun 2004 dan berakhir setelah krisis keuangan pada tahun 2008. Yang kedua terjadi pada tahun 2013-15, sebagian besar didorong oleh peningkatan imigrasi dari negara-negara UE-2 (Rumania dan Bulgaria) setelah pembatasan hak mereka untuk bekerja di Inggris dicabut. Pada Maret 2016, migrasi bersih UE mencapai puncaknya pada lebih dari 280.000, dengan lebih dari 500.000 warga negara UE pindah ke Inggris (The Immigration Observatory, 2023).

2. Momentum Antagonisme Laclau dalam Kasus *Brexit*

Laclau mendefinisikan populisme bukan sebagai ideologi politik melainkan sebagai sebuah momentum. Populisme berangkat dari momentum yang didasari oleh demands dan interest berupa tuntutan sosial. Hal ini berimplikasi pada munculnya *zero signifier*, yakni sebuah penanda kosong, yang mengandung ketidakstabilan diantara beragamnya identifikasi partikular. Saat mereka sudah berekivalensi dan berposisi dengan pihak penguasa, maka disitulah terjadi momentum atau Laclau menyebut dengan istilah momentum antagonisme ((Laclau, 2005).

Penanda kosong (*zero signifier*), biasanya menggunakan simbol-simbol identitas dengan makna yang lebih fleksible. Meskipun menggunakan simbol-simbol identitas, yang ingin ditampilkan adalah tuntutan atau wacana (diskursus). Kemudian, tuntutan yang terfragmentasi





didorong oleh kekuatan elit hegemonik sehingga menjadi suatu gerakan yang kolektif. Pada intinya, penanda kosong membantu menyederhanakan kompleksitas politik, menciptakan rantai ekivalensi antara tuntutan-tuntutan yang berbeda, dan menghasilkan identitas kolektif.

Laclau menegaskan bahwa tidak ada perubahan tanpa antagonisme. Mereka yang berkonflik akan bertarung dalam wacana politik dan siapa yang menang akan ditentukan oleh antagonisme nya (siapa yang memegang hegemoni). Dengan cara ini, negara akan menentukan konfigurasi politiknya akan seperti apa.

Dalam kasus *Brexit*, antagonisme memisahkan kepentingan antara “kami” (rakyat inggris) yang ingin mengambil kendali dan “mereka” (Uni Eropa) yang telah mengabaikan kepentingan nasional Inggris. Pembentukan oposisi antara "kami" dan "mereka" merupakan upaya *construct discourse* artinya identitas politik ini dibangun melalui diskursus atau wacana. Oposisi tersebut sebagai alat yang efektif dalam politik populis untuk melakukan perlawanan.

Organisasi kampanye “*Vote Leave*” merupakan bentuk gerakan antagonisme Inggris. Pesan penting yang disuarakan oleh “*Vote Leave*” adalah “*take back control*” terutama mengenai kebijakan imigran. Tujuan dari kampanye tersebut ingin melepaskan Inggris dari kontrol Uni Eropa sehingga Inggris dapat kembali mengatur dan menguasai negaranya sendiri. Kampanye ini dilaksanakan menjelang referendum tahun 2016, slogan tersebut menjadi sangat populer dan berkontribusi besar dalam memenangkan suara *Brexit*.

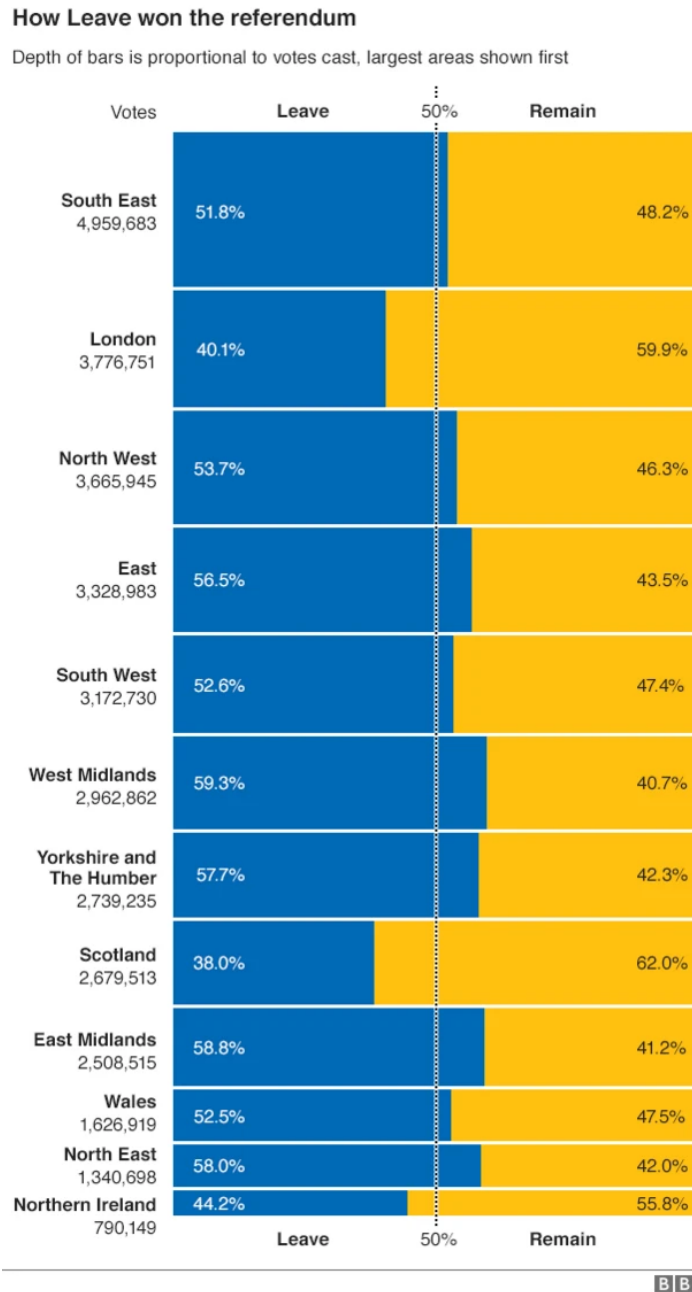
Metode kampanye *Vote Leave* adalah menggunakan media sosial, iklan TV serta poster. Kampanye ini menjadi momen bersejarah dalam pemilu Inggris, dengan cara kerja mengembangkan aplikasi smartphone interaktif yang didownload oleh puluhan ribu orang. Aplikasi tersebut mendorong pelanggan untuk mendaftarkan teman dan keluarga terdekat untuk bergabung dan berdiskusi. Aplikasi ini juga menyediakan fungsionalitas data pendukung *Brexit* (Khairunnisa, 2017).

Menariknya adalah terdapat kampanye oposisi *Vote Leave*, yang justru mendukung Inggris agar tetap menjadi bagian dari Uni Eropa. Organisasi kampanye tersebut adalah *Britain Stronger in Eropa* yang terdiri dari sejumlah besar CEO perusahaan. Isu yang diutamakan oleh kubu ini adalah isu ekonomi. Terlihat jelas perbedaan kepentingan dari 2 kubu kampanye tersebut. *Britain Stronger in Eropa* menyuarakan kepentingan ekonomi. Mereka beranggapan bahwa Uni Eropa sebagai mitra ekspor impor ekonomi bagi Inggris, dan Inggris akan mengalami kerugian besar ekonomi apabila keluar dari Uni Eropa. Sementara *Vote Leave* mementingkan isu imigran dan kedaulatan Inggris. Dua identitas tersebut terpecah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan yaitu mereka yang memilih “*Leave*” dan mereka yang memilih “*Remain*”.

Menurut data dari Electoral Commission of EU Referendum, sebanyak 48,1 % suara memilih “tetap menjadi bagian dari Uni Eropa) sedangkan 51,9% memilih “keluar dari Uni Eropa”. Pada akhirnya, kampanye *Vote Leave* menang dan hasil dari referendum adalah Inggris keluar dari Uni Eropa (lihat gambar 2).



Gambar 2 Hasil Referendum *Brexit* di Beberapa Wilayah United Kingdom



Sumber: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-36616028> diakses pada 18 Oktober 2024





Meskipun kebijakan imigran Uni Eropa memberikan dampak buruk bagi Inggris, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada kelompok yang tidak menyetujui keluar dari Uni Eropa dengan alasan kepentingan ekonomi. Namun, yang lebih penting dari itu, organisasi kampanye *Vote Leave* telah berkontribusi besar dalam peristiwa referendum *Brexit*. Narasi wacana yang dibangun oleh kelompok ini menggunakan logika populis, yaitu mengedepankan kepentingan identitas yang kolektif serta menekankan nilai-nilai nasional Inggris.

Slogan-slogan yang digunakan kelompok *Vote Leave* adalah sebagai simbol penanda kosong yang mengartikulasikan tuntutan atau wacana terhadap kelompok lawan. Tuntutan Inggris tentunya didasarkan atas demands dan interest yaitu ingin lepas dari kontrol Uni Eropa. Kelompok ini telah berekivalensi dan beroposisi dengan Uni Eropa, maka terjadilah momentum antagonisme. Demikianlah Laclau mengartikan antagonisme bukan sebagai arti yang negatif, melainkan antagonisme menjadi kunci dalam memahami bagaimana konflik sosial dan politik tidak hanya menjadi bagian dari perjuangan kelas seperti Marxisme tradisional, tetapi juga menjadi bagian dari berbagai dimensi sosial yang lebih luas, seperti etnis, identitas, dan lainnya.

Momentum antagonisme Laclau, sangat relevan digunakan dalam memahami fenomena yang kontemporer, seperti contohnya *Brexit*. Konfigurasi politik suatu negara menjadi penting diperhatikan dalam menerima kebijakan asing dan menjaga kepentingan nasional.

3. Kebijakan imigran Inggris Pasca *Brexit*

Memasuki era pemerintahan Theresa May, Inggris menggunakan kebijakan Sistem Imigrasi Berbasis Poin yang diadopsi dari kebijakan imigrasi Australia. Inggris memperkenalkan sistem imigrasi baru yang menggantikan kebebasan bergerak warga Uni Eropa. Orang-orang yang ingin bekerja di Inggris harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk keterampilan, tawaran pekerjaan dan kemampuan berbahasa Inggris. Kebijakan tersebut bermaksud untuk menarik pekerja terampil dari seluruh dunia, tidak hanya dari Eropa.

Poin penting dari kebijakan Sistem Imigrasi Berbasis Poin adalah segala bentuk pergerakan bebas imigran Uni Eropa telah berakhir dan digantikan dengan kebijakan Sistem Imigrasi Berbasis Poin, warga negara Inggris yang ingin tinggal di negara-negara Uni Eropa selama lebih dari 90 hari, dalam jangka waktu 90 hari, diwajibkan mereka harus mempunyai visa, dan warga negara Uni Eropa yang ingin tinggal di Inggris, maka mereka wajib menerapkan sistem berbasis poin yang sama seperti warga negara lain di dunia (Putra, Susanti, & Dewi, 2022).

KESIMPULAN

Antagonisme Ernesto Laclau dalam kasus *Brexit* muncul sebagai manifestasi dari ketegangan antagonistik masyarakat Inggris yang sudah ada sejak lama, namun baru menemukan momentumnya pada referendum tahun 2016. Gerakan *Vote Leave* dan *Britain Stronger in Europe* terpecah menjadi 2 kubu yang masing-masing didasari oleh demands dan interest.

Kubu *Leave* didasari oleh gerakan populi yaitu melakukan perlawanan terhadap Uni Eropa yang mendominasi politik dan kebijakan. Mereka menggunakan antagonismenya dengan menggambarkan Uni Eropa sebagai simbol dari penindasan kedaulatan nasional, meningkatnya arus imigrasi dan hilangnya kontrol domestik. Sementara kubu *Remain* mempertahankan kepentingan ekonomi, namun saat terjadi pertarungan wacana atau diskursus antara kedua kubu,



Remain mengalami kekalahan. Karena menurut Laclau sendiri, kemenangan ditentukan berdasarkan pada antagonismenya.

Kasus Brexit menunjukkan bahwa antagonisme tidak hanya tentang penolakan rasional terkait kebijakan Uni Eropa, melainkan tentang konflik mendasar yang membentuk identitas kolektif. Brexit bukan sekedar keputusan kebijakan, melainkan ekspresi dari antagonisme sosial yang lebih dalam, yang menggambarkan perjuangan untuk mengartikan "kami" dan "mereka" dalam kerangka politik Inggris. Kasus ini tidak mungkin terselesaikan secara total karena bagi Laclau semua identitas sosial bersifat kontingen dan suatu saat berubah-ubah. Dalam proses pembentukan identitas di masa yang akan datang seringkali terjadi antagonisme dari berbagai kepentingan yang ada sehingga dapat menimbulkan suatu momentum yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwis, D., & Howay, T. (2021). Keluarnya Britania Raya dari Keanggotaan Uni Eropa . *POLITICOS*, 14.
- Khairunnisa, D. (2017). ALASAN INGGRIS KELUAR DARI KEANGGOTAAN UNI EROPA TAHUN 2016. 18.
- Laclau, E. (2005). *On Populist Reason by Ernesto Laclau*.
- Luneto, R. (2021). DINAMIKA UNI EROPA: Integrasi Kawasan dan Referendum. *Ejournal Fisip Unjani*, 23.
- Observatory, T. I. (2023). Migrasi Uni Eropa ke dan dari Inggris.
- Putra, D. G., Susanti, S., & Dewi, P. R. (2022). Dampak Referendum Brexit Terhadap Kebijakan Imigran Uni Eropa di Inggris. 12.
- Sherin, H. A., & Virginia. (2018). PENGARUH BRITISH EXIT (BREXIT) TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS. *Journal of International Studies*, 15.
- Stefanie, K. (2022). KELUARNYA INGGRIS DARI KEANGGOTAAN UNI EROPA . *Jurnal Universitas Atmajaya*, 24.
- Net migration to the UK - Migration Observatory*. (2024, June 4). Migration Observatory. Retrieved October 18, 2024, from <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/long-term-international-migration-flows-to-and-from-the-uk/>

